

# Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kabupaten Bogor

Triane Widya Anggriani

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Jalan Raya Puncak km 11, Ciawi, Bogor 16552

Email : [trianewidya@gmail.com](mailto:trianewidya@gmail.com)

## Abstract

*Microfinance services is one of the approaches that has great potential to reduce poverty by providing financial services to low-income people. The increasing demand for microfinance services, emphasizes microfinance institutions to continue to be sustainable both financially and outreach. The purpose of this study was to analyze the sustainability of the Agribusiness Microfinance Institution (LKMA) in Bogor Regency. The concept of sustainability of microfinance institutions is made holistically, which includes financial sustainability and sustainability of outreach, where previous research has not much analyzed the sustainability of these two aspects. The sampling technique used was purposive sampling, from the survey results obtained as many as 15 LKMA who have financial statements for 2 years from 2016-2017. The results showed the sustainability index LKMA in Bogor Regency ranged from 0.02 to 0.71, where the average score of the sustainability index was 0.27. LKMA sustainability index scores are still relatively low, this shows that the performance of LKMA in Bogor Regency is not yet optimal*

**Keywords:** microcredit; microfinance institution; rural finance; sustainability;

**JEL Classification:** G21, G23

## I. PENDAHULUAN

Keuangan mikro telah dijadikan solusi untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan inklusi keuangan di beberapa negara. Keuangan mikro fokus memberikan kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses kepada perbankan formal. Pemberian kredit bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah diharapkan dapat memperoleh penghasilan yang cukup sehingga dapat memperluas bisnis mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluar dari kemiskinan. Pemerintah memberikan bantuan modal pinjaman kepada lembaga keuangan mikro untuk mengatasi keengganan perbankan formal dalam pinjaman kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Diharapkan dengan hadirnya keuangan mikro di perdesaan dapat mempermudah akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) merupakan bentukan dari program Kementerian Pertanian melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksanakan dengan fokus pada mekanisme pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan, mengembangkan potensi dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin khususnya petani di perdesaan. LKMA menyediakan bantuan pinjaman modal usaha bagi petani. PUAP telah dilaksanakan mulai dari tahun 2008 sampai 2015 di 52.186 desa/gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di perdesaan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah dana sebesar Rp 5.218.600.000.000,-. Setiap gapoktan yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan pedoman PUAP mendapatkan bantuan dana bergulir sebesar Rp 100 juta. Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana program PUAP yang berfungsi sebagai pengelola bantuan modal usaha bagi petani, dengan harapan dana tersebut dapat tumbuh dan

berkembang sehingga kebutuhan modal bagi usaha tani dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tindak lanjut dari program PUAP ini adalah adanya pembinaan terhadap penguatan dan pengembangan LKMA yang sudah dibentuk.

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor yang telah diberikan bantuan modal untuk pembentukan LKMA sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 201 Gapoktan yang tersebar di 30 kecamatan. Itu artinya dengan anggaran setiap gapoktan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 100.000.000,- maka jumlah total dana bantuan yang telah disalurkan untuk wilayah Kabupaten Bogor telah mencapai nilai Rp. 20,1 Milyar. Dari hasil evaluasi, dalam perkembangannya sampai tahun 2016 hanya 81 Gapoktan (40,3 persen) yang sudah terbentuk LKMA. Hal ini mengindikasikan beberapa LKMA mengalami masalah keberlanjutan usaha.

Keberlanjutan LKM sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Schreiner (2002) keberlanjutan LKM akan meningkatkan jangkauan pelayanan yang lebih luas terhadap masyarakat miskin dan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Anggaran besar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk menumbuhkan dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) tentunya program yang telah dilaksanakan ini harus dapat terus berkelanjutan, sehingga manfaat dari layanan keuangan mikro dapat dirasakan oleh masyarakat di perdesaan secara meluas dan dampak akhirnya adalah terjadinya pengurangan kemiskinan. Dengan memperhatikan dan menimbang nilai strategis LKMA sebagai LKM yang memiliki akses kepada petani miskin di perdesaan, maka kajian ini akan menganalisis keberlanjutan LKMA di Kabupaten Bogor.

Makalah ini disusun sebagai berikut : Bagian 2 membahas literatur yang relevan tentang topik keberlanjutan LKM. Metodologi penelitian disajikan pada bagian 3. Bagian 4 menyajikan hasil penelitian dan diskusi rinci tentang hasil dari penelitian ini. Akhirnya, kesimpulan disajikan pada Bagian 5 beserta cakupan lebih lanjut untuk perluasan penelitian.

## II. REVIEW LITERATUR

Keuangan mikro telah diidentifikasi sebagai alat penting dalam meningkatkan produktifitas masyarakat miskin dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Ide keuangan mikro didasarkan pada konsep bahwa ketidakmampuan masyarakat miskin dalam mengakses ke layanan keuangan merupakan hambatan serius bagi perbaikan ekonomi mereka, perubahan kehidupan dan mendapatkan sumber daya untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Zeller & Meyer, 2002). Pelayanan keuangan mikro dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara.

Pemahaman umum mengenai keberlanjutan LKM adalah LKM dapat menutup biaya atau mendapatkan keuntungan, sehingga LKM tetap beroperasi dan berkembang di masa depan tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah atau bantuan dana lainnya (CGAP, 2009; Sim & Prabhu, 2014). Menurut (Sharma & Nepal, 1997) keberlanjutan LKM adalah ketika pendapatan operasional dari pinjaman cukup untuk menutupi semua biaya operasional. Yaron (1994) mengidentifikasi empat kondisi untuk LKM bisa berkelanjutan, yaitu : 1) LKM harus mempunyai tingkat suku bunga pinjaman yang positif yang cukup untuk menutupi biaya-biaya yang tidak disubsidi (bagi LKM yang disubsidi) untuk menjaga tingkat equity riilnya. 2) Institusi mampu mencapai tingkat repayment yang tinggi. 3) Institusi harus menawarkan tingkat suku bunga tabungan yang tinggi untuk menarik masyarakat menabung secara sukarela sehingga akan meningkatkan secara signifikan portofolio pinjaman. 4) institusi harus efisien (termasuk biaya transaksi dan administrasi yang rendah) dalam hal menyangkut mekanisme dalam proses

skrining, proses pinjaman, menarik pinjaman di nasabah, juga memobilisasi dan melayani tabungan.

Beberapa penelitian, menyatakan bahwa indikator keberlanjutan LKM ditandai dengan keberlanjutan secara finansial (*financial viability and self sufficiency*) seperti yang dinyatakan oleh Asare (2018), Mahapatra & Dutta (2016), Molinero, Cinca, & Nieto, (2007). Padahal keberlanjutan LKM tidak hanya berlanjut secara finansial saja, namun juga harus berlanjut secara jangkauan (Morduch, 2000; Rhyne, 1998). Pada saat ini LKM semakin harus mempertimbangkan maksimisasi keuntungan dan misi sosial sebagai bagian dari operasi mereka. Peningkatan penjangkauan kepada orang miskin tidak dapat dicapai tanpa keberlanjutan keuangan LKM yang solid. Oleh karena itu tantangan nyata bagi LKM saat ini adalah untuk dapat menjangkau dan membantu masyarakat miskin dan pada saat yang sama LKM harus dapat menjalankan operasi keuangannya secara berkelanjutan. Meskipun penekanan semakin berkembang ke arah keberlanjutan finansial dan penjangkauan, belum banyak penelitian yang dilakukan dalam hal ini. Kinerja dalam dua dimensi ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan karena ini menunjukkan LKM dapat memberikan kontribusi pada pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien. Konsep segitiga keuangan mikro diperkenalkan oleh Zeller & Meyer (2002) merupakan konsep yang mendasari penelitian ini. Dimana tiga tujuan utama dari lembaga keuangan mikro adalah :

1. Mampu menjangkau kliennya (orang miskin) dalam jumlah besar
2. Memungkinkan orang miskin keluar dari kemiskinan.
3. Menciptakan lembaga keuangan yang berkelanjutan

Berbagai penelitian telah menggunakan aspek ini untuk memantau keberlanjutan LKM. Penelitian ini membahas keberlanjutan dari aspek jangkauan dan finansial. Teori jangkauan (*outreach*) adalah semakin banyak nasabah miskin yang dilayani LKM, maka semakin baik jangkauannya, terutama pada nasabah-nasabah yang paling miskin diantara yang miskin (Conning, 1999; Schreiner, 2002). Jangkauan pembiayaan mikro terbagi menjadi dua bagian, yaitu kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) dan keluasan jangkauan (*breadth of outreach*). Indikator dari kedalaman jangkauan dapat dilihat dari nilai rata-rata dari pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan terhadap nasabahnya, dimana semakin kecil pinjaman maka semakin dalam jangkauan (Cull, Demirgüç-kunt, & Morduch, 2007). Sedangkan indikator luasnya jangkauan dapat dilihat dari total nasabah yang diberikan pembiayaan/Peminjam aktif, semakin banyak peminjam maka jangkauannya semakin luas (Bhanot & Bapat, 2015). Keberlanjutan finansial yang sering digunakan pada beberapa penelitian adalah swasembada operasional (*Operational self sufficiency/OSS*) dan Swasembada keuangan (*Financial Self Sufficiency/FSS*) (Mahapatra & Dutta, 2016) dan beberapa penelitian (Okumu, 2007; Ruben & Schers, 2007) lebih menggunakan OSS daripada FSS sebagai indikator kinerja keberlanjutan LKM.

Kebaruan penelitian ini adalah membuat indeks keberlanjutan lembaga keuangan mikro secara holistik yakni mencakup keberlanjutan finansial dan keberlanjutan jangkauan, dimana penelitian sebelumnya masih membahas dalam satu sisi aspek saja. Komersialisasi LKM menuntut setiap LKM untuk dapat berkelanjutan secara finansial dan jangkauan yang akan berdampak luas pada penurunan kemiskinan.

### III. METODOLOGI

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis indeks keberlanjutan LKMA di Kabupaten Bogor yang mencakup keberlanjutan finansial dan keberlanjutan jangkauan. Indeks komposit dibentuk dengan kompilasi dari beberapa indikator menjadi satu indeks untuk memudahkan mengukur multidimensi (seperti indeks keberlanjutan) (Nardo et al., 2008). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan LKMA dari tahun 2016 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara

*purposive sampling* dengan kriteria LKMA yang tersedia laporan keuangan secara lengkap selama dua tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2017. Data hasil survey diperoleh dari 81 LKMA yang terdaftar di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor hanya terdapat 15 LKMA yang lengkap.

Indeks keberlanjutan diukur melalui tiga indikator, yakni keberlanjutan finansial dilihat dari rasio *Operational Self Sufficient* (OSS) – rasio OSS yang menunjukkan kemampuan LKM untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya (*benefit/cost*). Keberlanjutan jangkauan dilihat dari rata-rata pinjaman (*Average loan per borrowers/ALPB*) – yang mencerminkan kedalaman jangkauan dan jumlah peminjam aktif (*Number of active borrowers/NAB*) – yang merefleksikan dari luasnya jangkauan (Bhanot & Bapat, 2015). Ketiga indikator tersebut kemudian nilainya distandarisasi dan setelah itu dibuat indeksnya. Penghitungan indeks keberlanjutan menggunakan penghitungan indeks komposit dengan rata-rata hitung, dengan rumus sebagai berikut :

$$IK = 1/3 [X1 + X2 + X3] \quad (1)$$

Dimana IK = Indeks Keberlanjutan LKMA, X1 = Indeks keberlanjutan finansial (B/C), X2 = Indeks keberlanjutan kedalaman jangkauan (saldo pinjaman rata-rata per peminjam), dan X3 = Indeks keberlanjutan luasnya jangkauan (banyaknya peminjam aktif). Masing-masing indeks komponen tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dengan nilai minimumnya dan selisih nilai maksimum dengan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X(i) = [X_i - X_{\min}] / [X_{\max} - X_{\min}] \quad (2)$$

Indeks keberlanjutan yang sudah diperoleh ini kemudian akan dianalisis untuk melihat bagaimana keberlanjutan lembaga keuangan agribisnis di kabupaten Bogor.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah menggambarkan karakter sampel data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 15 LKMA yang menjadi observasi dengan data keuangan selama 2 tahun yakni pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian data yang diperoleh secara keseluruhan dibuat rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasinya. Statistik deskriptif dari setiap variabel disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 variabel yang digunakan dalam indeks keberlanjutan LKM memuat 3 indikator keberlanjutan LKM, yakni keberlanjutan keuangan yang diwakili oleh *Operational Self Sufficient* (OSS) dan keberlanjutan jangkauan yang diwakili oleh *Average Loan Balance per Borrowers* (ALPB) dan *Number of Active Borrowers* (NAB). *Operational Self Sufficiency* (OSS) tahun 2016-2017 dari 15 LKMA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,36 dengan standar deviasi sebesar 0,46. Nilai minimum OSS sebesar 0,85 yang berarti terdapat LKMA yang mengalami kerugian dimana total biaya lebih besar dibandingkan total pendapatan. LKMA yang memiliki nilai OSS lebih kecil dari 1 adalah LKMA Flamboyan, Sukagalih, Pandan wangi dan Jaya Bakti. Sedangkan nilai maksimum OSS sebesar 2,98 dari LKMA Tajur Tani,-. *Average Loan Balance per Borrower* (ALBP) merupakan rata-rata pinjaman dari setiap LKMA selama satu tahun. Rata-rata LKMA memberikan pinjaman kepada anggotanya sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan nilai minimumnya sebesar Rp. 500.000,- dan nilai maksimum pinjaman yang diberikan LKMA adalah sebesar Rp. 3.288.000,-. *Number of active Borrowers* (NAB) merupakan jumlah peminjam aktif LKMA selama satu tahun. Rata-rata jumlah peminjam LKMA

selama satu tahun sebanyak 33 orang. Peminjam aktif terbanyak adalah LKMA Rukun Tani yang memberikan pinjamannya selama satu tahun kepada 136 orang. Capaian ini dinilai berhasil karena mengindikasikan keberlanjutan LKMA masih berjalan, hal ini dapat dilihat dari jumlah peminjam aktif yang berarti modal pinjaman LKMA Rukun Tani bergulir.

Tabel 1. Statistik deskriptif indikator keberlanjutan LKMA

Nama Variabel	Obs.	Min	Max	Mean	SD
<b>Keberlanjutan Finansial</b>					
<i>Operational Self Sufficiency</i> (OSS) ratio (in%)	30	0,85	2,98	1,36	0,46
<b>Keberlanjutan Jangkauan</b>					
<i>Average Loan Balance per Borrower</i> (ALPB) (in Rp)	30	590 909	3 288 909	1 601 721	699 808
<i>Number of Active Borrowers</i> (NAB)	30	4	136	33,43	35,04

Sumber : Data Primer diolah (2018)

Deskriptif statistik untuk nilai indeks keberlanjutan LKMA dapat dilihat pada Tabel 2. Rata-rata skor nilai indeks berkelanjutan LKMA di Kabupaten Bogor berkisar antara 0.021 sampai 0.706, dengan rata-rata nilai indeks sebesar 0,28 pada tahun 2016 dan 0,27 pada tahun 2017. Skor indeks keberlanjutan LKMA di Kabupaten Bogor yang rendah menunjukkan kinerja LKM masih rendah.

Table 2 Statistik Deskriptif Skor Indeks Keberlanjutan LKMA

Sustainability Index	n	Min	Max	Mean	SD
2016	15	0.021	0.646	0.280	0.184
2017	15	0.075	0.706	0.274	0.210

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil penghitungan indeks keberlanjutan, nilai indeks LKMA diranking untuk melihat LKMA mana yang memiliki keberlanjutan paling baik (disajikan pada Tabel 3). Peringkat 3 terbesar pada tahun 2016 dan 2017 adalah LKMA yang sama yakni LKMA Rukun Tani, Tajur Tani, dan Mandiri Jaya. Tiga LKMA ini menunjukkan keberlanjutan yang relatif baik dibandingkan dengan LKMA yang lainnya.

Tabel 3 Skor indeks keberlanjutan LKMA tahun 2016 dan 2017

Peringkat	Skor indeks	Nama LKMA	Peringkat	Skor indeks	Nama LKMA
	keberlanjutan KMA Tahun 2016			keberlanjutan LKMA Tahun 2017	
1	0,646	Rukun Tani	1	0,706	Rukun Tani
2	0,567	Tajur Tani	2	0,680	Tajur Tani
3	0,449	Mandiri Jaya	3	0,485	Mandiri Jaya
4	0,407	Ranji Mukti	4	0,458	Ranji Mukti
5	0,351	Sejahtera	5	0,378	Antanan
6	0,349	Tani Berkah	6	0,234	Jaya Bakti
7	0,324	Antanan	7	0,216	Plamboyan

8	0,254	Plamboyan	8	0,199	Medal Sari
9	0,198	Usaha Tani	9	0,198	Usaha Tani
10	0,162	Sadar Tani	10	0,178	Tani Berkah
11	0,160	Jaya Bakti	11	0,126	Sejahtera
12	0,126	Harum Manis	12	0,125	Sadar Tani
13	0,097	Sukagalih	13	0,077	Harum Manis
14	0,081	Medal Sari	14	0,077	Pandan Wangi
15	0,021	Pandan Wangi	15	0,075	Sukagalih

Sumber : Data primer yang diolah (2018)

Untuk melihat capaian indikator setiap LKMA, maka hasil capaian indikator setiap LKMA disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Capaian indikator keberlanjutan LKMA di Kab. Bogor

Pada tahun 2016, capaian tertinggi untuk indikator indeks rasio OSS adalah LKMA Tajur Tani. Hal ini menunjukkan bahwa LKMA Tajur Tani memiliki keberlanjutan finansial yang relatif baik diantara LKMA lainnya di Kabupaten Bogor. Capaian tertinggi untuk indikator jumlah peminjam (NAB) adalah LKMA Rukun Tani. LKMA Rukun Tani merupakan LKM yang memiliki paling banyak peminjam dan anggotanya. Hal ini menyiratkan adanya perluasan jangkauan layanan keuangan mikro pada masyarakat di sekitarnya. Sedangkan capaian tertinggi untuk indikator rata-rata pinjaman (ALPB) adalah LKMA Ranji Mukti. Tingginya rata-rata pinjaman yang diberikan kepada anggota di LKMA Ranji Mukti salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya anggota pada LKMA Ranji Mukti, sehingga dana pinjaman yang diberikan LKMA pada anggota menjadi lebih besar.

Pada tahun 2017, capaian tertinggi untuk indikator indeks rasio OSS adalah masih sama yakni LKMA Tajur Tani. Hal ini menunjukkan bahwa LKMA Tajur Tani memiliki keberlanjutan finansial yang relatif baik diantara LKMA lainnya di Kabupaten Bogor. Capaian tertinggi untuk indikator jumlah peminjam (NAB) adalah juga masih sama yakni LKMA Rukun Tani. LKMA Rukun Tani merupakan LKM yang memiliki paling banyak peminjam dan anggotanya. Hal ini menyiratkan adanya perluasan jangkauan layanan keuangan mikro pada masyarakat di sekitarnya. Sedangkan capaian tertinggi untuk indikator rata-rata pinjaman (ALPB) adalah LKMA Mandiri Jaya. LKMA Mandiri Jaya merupakan salah satu LKMA terbaik di Kabupaten Bogor, karena perguliran dana pinjaman masih diberikan kepada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa LKMA masih berjalan dan melayani masyarakat di sekitar LKMA Mandiri Jaya.

Masalah keberlanjutan LKMA ternyata tidak hanya dialami oleh Kabupaten Bogor saja, keberlanjutan LKMA di Indonesia sebagian besar juga mengalami masalah dalam keberlanjutan.

Hasil evaluasi Kementerian Pertanian pada tahun 2015, dari 52.186 gapoktan yang diberi bantuan modal untuk penumbuhan LKMA, hanya 6.382 yang sudah terbentuk LKMA (12 persen). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdapat beberapa faktor yang menghambat keberlanjutan LKMA. Tinambunan (2017) mengemukakan setidaknya ada dua bentuk penyimpangan terhadap penggunaan dana PUAP. Penyimpangan pertama adalah penyaluran bantuan PUAP ke gapoktan belum tepat sasaran yaitu kepada gapoktan yang belum/tidak siap dan mampu untuk menerima program PUAP. Penyimpangan yang kedua adalah pada tahap penggunaan/pengelolaan dana puap, yakni ketidakmampuan dan minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan dana PUAP sehingga menyebabkan dana PUAP yang disalurkan tidak berkembang. Maharani dan Ammatillah (2015) menyatakan bahwa kendala pengembangan LKMA terletak pada aspek organisasi, aspek pengelolaan dana PUAP, tingginya tingkat pembiayaan yang bermasalah (kredit macet), terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki gapoktan serta belum optimalnya peran PMT dan penyuluh pendamping gapoktan. Selain itu, beberapa LKMA masih belum memiliki payung hukum ataupun legalitas. Beberapa kendala tersebut membawa konsekuensi pada tidak berlanjutnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terbentuk. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2013) yang menunjukkan bahwa masalah utama LKM syariah dan konvensional adalah keberlanjutan karena mereka berusaha mempertahankan kinerja keuangan dan berusaha untuk meningkatkan basis klien dalam konteks regional.

Kebanyakan lembaga keuangan mikro yang dibangun oleh program pemerintah menghadapi persoalan mengenai keberlanjutan aktivitas mereka. Sebab ketidakmampuan menjaga keberlanjutan mereka dapat bermacam-macam mulai dari ketergantungan terhadap *support* baik dari pemerintah dan donor, hanya merupakan proyek yang memang didesain untuk sementara waktu saja, ketiadaan sistem keuangan mikro yang memadai, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan situasi pasar keuangan mikro yang ada. Menghadapi masalah ini, kiranya perlu diingat bahwa aktivitas keuangan mikro hanya akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat miskin manakala pelayanan keuangan mikro yang diberikannya dapat berlanjut.

Pelaksanaan program keuangan mikro yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya adalah program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Dari hasil analisis terlihat bahwasanya sebagian besar LKMA yang sudah terbentuk ini memiliki indeks keberlanjutan yang rendah. Jika dikaitkan dengan teori '*The Triangle of Microfinance*' yang ditulis oleh Zeller dan Meyer (2002) menyatakan bahwa keberlanjutan LKM dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi berbagai jenis inovasi kelembagaan dan teknologi serta praktik terbaik yang berkontribusi terhadap keberlanjutan finansial seperti penggunaan sistem informasi yang mengurangi biaya, layanan yang berorientasi kepada orang miskin dan pelatihan yang efektif terhadap peminjam. LKMA yang merupakan bentukan dari program pemerintah ternyata tidak memiliki inovasi kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan keuangan terhadap anggota, dimana layanan yang diberikan hanya berupa pinjaman. Layanan tabungan masih belum dikembangkan dalam LKMA. Selain itu pembukuan keuangan masih dilakukan secara sederhana.

Faktor eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan LKMA adalah kebijakan makroekonomi dan sektoral yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja lembaga keuangan. Pemerintah sudah berupaya untuk mendukung program keuangan mikro bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program yang telah dilaksanakan melalui bantuan dana bergulir simpan pinjam yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat. Namun kurangnya kontrol dan pendampingan bagi LKM menyebabkan timbulnya moral hazard di lingkungan masyarakat. Tidak adanya sanksi dan agunan menyebabkan peminjam tidak mau mengembalikan pinjaman dana kepada LKM.

*Joint Liability Lending* (JLL) merupakan salah satu alternatif solusi dalam pembiayaan di lembaga keuangan mikro. Simtowe dan Zeller (2006) menyatakan bahwa asimetri informasi setidaknya menyebabkan empat masalah dalam pasar kredit, yaitu *adverse selection*, *moral hazard*, kurangnya asuransi, dan kurangnya penegakan hukum. Hubungan antara permasalahan yang timbul pada setiap kredit yang disalurkan dapat diatasi dengan menerapkan konsep *Joint Liability Lending* (JLL)/Pinjaman Tanggung Jawab Bersama. Pada tahap pertama adalah tahapan yang dilalui sebelum pengadaan kontrak. Tahapan tersebut mencakup seleksi anggota. Masalah yang timbul pada tahapan ini adalah *adverse selection*. Masalah tersebut dapat diatasi dengan mengadakan seleksi secara ketat terhadap pemilihan anggota dalam kelompok. Tahap kedua yaitu pada periode investasi, para peminjam dihadapkan pada masalah *ex-ante moral hazard*. Hal ini terjadi ketika peminjam memutuskan untuk berinvestasi dalam proyek yang berisiko atau menyalahgunakan dana. Sehingga yang harus dilakukan menurut solusi teoritis yaitu dengan pengawasan yang dilakukan antara anggota dan petugas dari lembaga keuangan mikro. Tahap ketiga mengenai hasil investasi dari dana yang telah diberikan, investasi ini mungkin gagal karena beberapa alasan atau diakibatkan oleh hal-hal yang diluar kendali peminjam. Masalah yang dihadapi pada tahap ini adalah tanggungjawab terbatas. Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu membayar anggota lain yang mengalami kegagalan bayar (intra-group asuransi). Masalah terakhir adalah berkaitan dengan *ex-post moral hazard*. Hal ini terjadi ketika usaha telah dilakukan dan keuntungan hasil investasi telah terwujud, bila peminjam menemukan jalan untuk menyimpangkan dana yang seharusnya untuk pembayaran pinjaman tetapi ditujukan untuk tujuan lain. Dalam kewajiban pinjaman bersama, menerapkan tekanan sesama dan sanksi sosial dapat memecahkan masalah *ex-post moral hazard*.

## V. KESIMPULAN

Keberlanjutan LKMA tidak hanya ditandai dengan keberlanjutan secara finansial saja, melainkan harus diikuti dengan keberlanjutan jangkauan. Berkembangnya LKM saat ini menuntut setiap LKMA bertindak secara efisien dan efektif. Indeks keberlanjutan LKMA yang dibuat ini sudah mencakup keberlanjutan finansial dan keberlanjutan jangkauan. Hasil penelitian menunjukkan indeks keberlanjutan LKMA di Kabupaten Bogor berkisar antara 0,021 sampai 0,706, dimana rata-rata skor indeks keberlanjutan sebesar 0,27. Skor indeks keberlanjutan LKMA masih relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja LKMA belum maksimal. Tiga LKMA terbaik di Kabupaten Bogor menurut hasil skor indeks keberlanjutan adalah LKMA Rukun Tani, Tajur Tani dan Mandiri Jaya. Perlunya meningkatkan sosialisasi pemahaman kepada petani dan masyarakat mengenai keberlanjutan LKMA. Kesadaran anggota tentang manfaat keuangan mikro di masyarakat dan perlunya merubah pola pikir dan sikap petani terhadap bantuan modal dari pemerintah yang dianggap tidak perlu dibayar. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dalam hal pengajuan pinjaman oleh petani, pemanfaatan dan pengembalian dana ke LKMA. Mengaktifkan peran penyuluh pendamping gapoktan karena pengurus dan masyarakat masih memerlukan arahan dalam mengembangkan usaha, yakni dalam hal administrasi maupun budidaya usahatani kepada anggota secara intensif dan berkelanjutan.

## References

Asare, G. (2018). *Factors Influencing the Sustainability of Microfinance Institutions in Ghana : a*

- Case of Microfinance Institutions in Ashanti Region.* Norwegian University of Life Sciences.
- Bhanot, D., & Bapat, V. (2015). Sustainability index of micro finance institutions (MFIs) and contributory factors. *International Journal of Social Economics*, 42(4), 387–403. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2014-0001>
- Conning, J. (1999). Outreach, sustainability and leverage in monitored and peer-monitored lending. *Journal of Development Economics*, 60(1), 51–77.
- Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). (2009). *Financial Analysis for Microfinance Institutions*. Washington DC.
- Cull, R., Demirgüç-kunt, A., & Morduch, J. (2007). Financial Performance and Outreach : A Global Analysis of Leading a Microbanks. *The Economic Journal*, 117, F107–F133.
- Effendi, J. (2013). The role of Islamic microfinance in poverty alleviation and environmental awareness in Pasuruan, East Java, Indonesia (Universitätsdrucke Gottingen). <https://doi.org/10.17875/gup2013-230>
- Mahapatra, M. S., & Dutta, S. (2016). Determinants of Sustainability of Microfinance Sector in India. *Journal of Rural Development*, 35(3), 507–522.
- Maharani, W. S., & Ammatillah, C. S. (2015). Pengembangan Program PUAP di DKI Jakarta : Peluang dan Tantangan. *Buletin Pertanian Perkotaan*, 5(30), 7–17.
- Molinero, C. M., Cinca, C. S., & Nieto, B. G. (2007). Microfinance Institutions and Efficiency. *Omega*, 35(2), 131–142.
- Morduch, J. (2000). The Microfinance Schism. *World Development*, 28(4), 617–629.
- Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., & Giovannini, E. (2008). *Handbook of Constructing Composite Indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.
- Okumu, L. (2007). *the microfinance industry in Uganda: sustainability, outreach and regulation*. university of Stellenbosch.
- Rhyne, E. (1998). The Yin and Yang of Microfinance : reaching the Poor and Sustainability. *Microbanking Bulletin*, July.
- Ruben, R., & Schers, S. (2007). Microfinance portfolio performance an explorative analysis determinants of outreach, sustainability and risk. *Microfinance - What Do We Know?*
- Schreiner, M. (2002). Aspects of outreach: A framework for discussion of the social benefits of microfinance. *Journal of International Development*, 14, 1–13. <https://doi.org/10.1002/jid.908>
- Sharma, S., & Nepal, V. (1997). Strengthening of credit institutions/programs for rural poverty alleviation in Nepal. *United Nations. Economic and Social Council (ECOSOC) for Asia and Pacific. Bangkok, Thailand*.
- Sim, J., & Prabhu, V. V. (2014). The Sustainability and Outreach of Microfinance Institutions. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, 439(PART 2), 286–293. [https://doi.org/10.1007/978-3-662-44736-9\\_35](https://doi.org/10.1007/978-3-662-44736-9_35)
- Simtowe F, Zeller M. 2006. Determinants of moral hazard in microfinance: empirical evidence from joint liability lending programs in Malawi. MPRA Paper No. 461.
- Tinambunan, A. (2017). Kepastian Hukum Penyaluran Dana dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA). *Jurnal Living Law*, 9(1), 218–231.
- Yaron, J. (1994). What makes rural finance institutions successful? In *The World Bank Research Observer* (Vol. 9, pp. 49–70). Retrieved from <http://wbro.oxfordjournals.org/>
- Zeller, M., & Meyer, R. L. (2002). *The Triangle of Microfinance : Financial Sustainability, Outreach, and Impact*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.